

**POLITIK KEKERABATAN DI PILKADA: STUDI KASUS
TERPILIHNYA PASANGAN CALON HJ. SRI HARTINI S.E – HJ. SRI
MULYANI PADA PILKADA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015**

Catur Puguh Pamungkas

14010114120022

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Abstract

The issues of palace politics emerge along with the candidacy of Sri Hartini – Sri Mulyani as a candidate for Regent and a candidate for Vice Regent of Klaten Regency. The candidate candidacy is associated with the palace politics because the figures have a marriage bond with the previous ruler. The implementation of the election regency of Klaten was won by Sri Hartini-Sri Mulyani's partner with the acquisition of 321.593 votes or 54.39% of the valid ballots. There are figures that influence the palace politics in the election that is Sunarna as the Chairman of PDIP DPC Klaten Regency and the local ruler. The winner of the palace politics is closely linked to the political culture of neo-patrimonialism involving the patron-client relationship and governmental authority.

The purpose of this study is to analyze how the palace politics work in winning candidate pairs in the election regency. The palace politics in winning a candidate cannot be separated from the candidate's figuration, the strength of the political party, and the relationship of palace politics with neo-patrimonialism culture. The method of the study is the qualitative explorative, in which the primary data from this study is obtained directly from interviewing activity with the resource while the secondary data is obtained indirectly through documents, mass media, internet, and other literary studies. Furthermore, the writer examines the data with the data obtained to draw the conclusion and verification of the data. Thus, it produces the descriptive data, which is to describe the results of the analysis of how the palace politics work in the election regency.

Keywords: Election of Regent, Local Democracy, Palace Politics, Neo-Patrimonialism.

PENDAHULUAN

Praktik politik kekerabatan dewasa ini menjadi pembicaraan hangat dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dipandang sebagai dampak lemahnya pelembagaan kepartaian dan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik sebagaimana mestinya, menimbulkan kecenderungan menguatnya politik kekerabatan yang tampaknya menjadi jalan pintas bagi partai politik untuk memenangkan kontes politik maupun menjamin eksistensi suatu rezim politik tertentu (Harjanto,2011,hlm. 138). Penguatan politik kekerabatan ini tampak sekali dalam pemilihan kepala daerah langsung, termasuk di Kabupaten Klaten dimana terdapat partai yang mengukung kader-kader dari kerabat atau keluarga kalangan petahana (incumbent). Penelitian ini mengkaji politik kekerabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, dengan studi kasus Pilkada serentak tahun 2015.

Pasangan Sri Hartini, SE dan Sri Mulyani tidaklah asing dimata masyarakat Kabupaten Klaten. Sri Hartini merupakan istri dari mantan Bupati Klaten Alm. Haryanto Wibowo yang menjabat pada tahun 2000-2005. Selanjutnya, Sri Mulyani adalah istri dari Sunarna Bupati Klaten yang telah menjabat selama dua periode yaitu periode 2005-2010 dan 2010-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga dapat dijadikan suatu alat untuk meneruskan eksistensi kekuasaan dalam pemilihan umum. Politik kekerabatan dan dinasti atau keluarga politik semakin menguat yang tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu khususnya pada Pilkada.¹ Politik kekerabatan dianggap sebagai senjata yang efektif dalam pemenangan kontes demokrasi terutama dalam Pilkada, karena figur terkait mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk menggerakkan masyarakat pemilih agar menggunakan suaranya untuk memilih pasangan terkait. Hal tersebut sejalan dengan konsep perilaku pemilih dimana faktor

¹ Harjanto, Nico 2011,*ANALISIS CSIS: Politik Kekerabatan di Indonesia*, Jakarta, CSIS hlm. 152

yang dapat mempengaruhi perilaku memilih salah satunya adalah sikap loyal pada ketokohan figur tertentu².

Persaingan politik dalam menduduki kursi jabatan politik tertinggi di Kabupaten Klaten dimenangkan oleh pasangan Sri Hartini, SE dan Sri Mulyani. Hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan Sri Hartini, SE dan Sri Mulyani memperoleh suara terbanyak dengan 321593 suara (54,39%). Posisi kedua adalah pasangan One Krisnata dan Drs. H. Sunarto, M.Hum dengan perolehan 273189 suara (36,06%). Terakhir adalah pasangan H. Mustafid Fauzan, SE dan Sri Harmanto, SE, M.Si dengan perolehan 62849 Suara (9,55%).³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten menetapkan pasangan *duo Sri* yakni Sri Hartini-Sri Mulyani (Hati Mulya) sebagai pasangan terpilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, setelah Keputusan tertanggal 22 Desember 2015 itu ditandatangani Ketua KPU Klaten, Siti Farida dan Kasubag Hukum Sekretariat KPU Klaten, Wahyu Agustini, Selasa (22/12/2015).⁴

Terpilihnya Sri Hartini dan Sri Mulyani menunjukkan masyarakat Kabupaten Klaten ternyata masih terpaku dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Menurut (Sjamsuddin,1993) primordialisme ialah perasaan-perasaan yang mengikat seseorang dikarenakan oleh berbagai hal, yang tergolong dalam kondisi ini ialah faktor-faktor seperti daerah atau tempat kelahiran, suku, ikatan darah, ras, agama dan perasaan yang sama⁵. Pemikiran primordial berujung pada perilaku memilih untuk mengedepankan calon dari keluarga kalangan petahana sehingga regenerasi rezim kepemimpinan hanya berputar pada satu lingkup keluarga tertentu. Pilihan regenerasi model kekerabatan ini merupakan cerminan bahwa masyarakat Kabupaten Klaten masih mempraktikkan

² Saiful Mujani, R. Dkk 2012, *Kuasa Rakyat: Analisa Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Media Utama (MMU) Hlm. 19-21

³ <https://Pilkada2015.kpu.go.id/Klatenkab> diakses pada 8 maret 2017

⁴ <http://www.suarapemilih.com/kpu-tetapkan-duo-sri-jadi-pemenang.html> diakses pada 7 maret 2017

⁵ Sjamsuddin, Nazzaruddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41

model demokrasi yang hanya percaya pada kemampuan yang dimiliki oleh calon-calon yang segaris dengan keturunan kepala daerah sebelumnya. Praktik politik kekeluargaan atau dinasti politik tidak bisa dipandang buruk, karena memang setiap warga Negara siapa pun itu memiliki hak yang sama untuk memilih ataupun dipilih dalam berpolitik, melakukan atau tidak melakukan dinasti politik.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan beragam pokok permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan bagaimana politik kekerabatan bekerja dalam Pilkada di Kabupaten Klaten tahun 2015.

KERANGKA TEORITIS

Praktik dinasti politik dalam demokrasi sejatinya tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara Indonesia merupakan milik seluruh warganya bukan didominasi oleh keluarga tertentu saja. Sehingga, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya oleh rakyat yang akan dipimpinya. Praktek politik dinasti di Indonesia muncul dalam bentuk aji mumpung. Artinya, mumpung sang bapak sedang berkuasa, maka diwariskanlah kekuasaannya pada anaknya, istrinya, adiknya, iparnya maupun kerabat lainnya. Sehingga yang berkembang adalah patrimonial, artinya kekuasaan hanya berputar-putar saja di lingkaran keluarga atau kerabat tertentu.

Dinasti adalah kata yang berdefinisi otokrasi atas sensitivitas pencitraan moyang, kakek, nenek, ayah, ibu, saudara, maupun kerabatnya masih menjadi benteng pertahanan *legitimasi power*. Dinasti dalam politik menciptakan lingkaran kekuasaan atau strukturisasi yang mendudukan keluarga, anak, dan koleganya (Abdurrahman, 2015, hlm. 108)⁶. Lingkaran kekuasaan mencakup jabatan strategis yang bersifat satu garis instruksi maupun koordinasi dan jabatan strategis yang didapat melalui pemilihan

⁶ Abdurrahman, Muhammad, 2015 *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*. Yogyakarta, Buku Litera hlm. 108

umum seperti Pilkada untuk menjadi pemimpin disuatu daerah. Dinasti Politik menurut pengertian Agustino (2011, hlm. 130) adalah suatu “kerajaan politik” dimana elit menempatkan keluarganya, saudaranya, dan kerabatnya di beberapa pos penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional,⁷ atau bisa dikatakan, elit membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. Dengan adanya jaringan tersebut akan mempermudah suatu kalangan keluarga atau kerabat tertentu untuk meneruskan rantai kekuasaan.

Budaya politik di Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang telah banyak mengalami perkembangan, salah satu dampak dari budaya politik yang berkembang adalah munculnya konsep patrimonialisme hingga neo patrimonialisme. Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Kantaprawira, 2006, hlm. 25).⁸ Dalam praktiknya budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan.

Bentuk patrimonial di Indonesia berkembang pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dimana hal tersebut bermula dari kultur Asal Bapak Senang (ABS) pada kala itu, sifat birokrasi yang bercirikan patron-klien melahirkan tipe birokrasi patrimonial, yakni suatu birokrasi di mana hubungan-hubungan yang ada, baik internal maupun eksternal adalah hubungan antar patron dan klien yang sifatnya sangat pribadi dan khas.⁹ Dalam bukunya Agustino (2014, hlm. 173)¹⁰ menyebutkan Patron muncul

⁷ Agustino, Leo, 2011, *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Bandung, Widya Padjadjaran hlm.. 130

⁸ Kantaprawira, Rusadi, 2006, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Jakarta, Sinar Baru Algesindo, hlm. 25

⁹ Saleh, Khoirul dan Achmat Munif, 2015, *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*, Jawa Tengah, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Hlm. 321

¹⁰ Agustino, Leo, 2014, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung, Alfabeta, hlm. 173

sebagai individu yang memiliki kelebihan, kekayaan, atau kekuasaan, sedangkan klien hadir sebagai anggota masyarakat biasa yang tidak mempunyai kelebihan tersebut, sehingga hubungan tersebut dilandaskan oleh pertukaran kepentingan antar patron dan klien. Patrimonial dalam proses kepemimpinan kepala daerah berkembang dan mengarah pada suatu proses yang membuka ruang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) dimana Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang dapat digunakan untuk mengarahkan penggunaan intitusi publik sebagai domain kekuasaannya.¹¹ Pemimpin eksekutif dalam artian Kepala Daerah memiliki kesempatan yang besar dalam bergerak disektor publik seperti; jabatan, anggaran, kebijakan, proyek dan lainnya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa, dimana melalui hal tersebut pemimpin menjadi kunci utama dalam prosesnya. Pemimpin eksekutif dalam mempertahankan kekuasaannya menawarkan keuntungan dari hubungan patronase yang dijalin. Seiring berjalannya waktu muncullah hubungan neo patrimonial, Saleh (2015, hlm. 322) memberikan gambaran bagaimana hubungan tersebut terjalin seperti halnya segala proyek pembangunan dipegang oleh salah satu pejabat, promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku (jalan pintas), anak pejabat menjadi pengusaha besar dengan memanfaatkan kekuasaan orang tuanya, Anak pejabat memegang posisi strategis dalam pemerintahan maupun partai politik.¹² Kaitan keluarga maupun kerabat dalam hubungan neo patrimonialisme menjadi awal mula bagaimana politik kekerabatan atau politik dinasti dapat berkembang dengan demikian hubungan pertukaran kepentingan akan terus berlangsung sebagai strategi dalam mempertahankan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai

¹¹ Ibid, hlm. 174

¹² Saleh, Khoirul dan Achmat Munif, 2015, *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*, Jawa Tengah, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Hlm. 322

suatu fenomena menurut pandangan narasumber yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan persepsi, pendapat atau pernyataan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan eksploratif yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan menggali informasi dari narasumber yang dianggap penting untuk selanjutnya peneliti dapat menjelaskan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. (Arikunto, 2006, hlm. 7)¹³ menjelaskan penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Metode penelitian kualitatif eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian kualitatif eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis mengenai objek penelitian kita

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik kekuasaan dengan “memberi” atau “memasukan” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan disebut dengan politik kekerabatan atau dinasti politik. Politik kekerabatan muncul di Kabupaten Klaten dengan melibatkan dua keluarga yang silih berganti menempati kursi kekuasaan sebagai bupati maupun wakil bupati. Rantai kekuasaan di Kabupaten Klaten memiliki pola yang cukup unik. Bupati Haryanto Wibowo, suami Sri Hartini, menjabat sebagai Bupati Klaten periode 2000-2005. Kemudian, Haryanto digantikan Bupati Klaten Sunarna, Suami Sri Mulyani ini berpasangan dengan Samiadji, S.E. M.M yang terpilih untuk masa bakti 2005-2010. Selanjutnya Sunarna kembali mengikuti kontes Pilkada pada tahun 2010 untuk maju pada periode ke dua sebagai calon bupati petahana berpasangan dengan Sri Hartini selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten tahun 2006-2010 yang tak lain adalah istri dari Alm. Haryanto Wibowo yang pernah menjabat sebagai bupati pada

¹³ Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, hlm. 7

tahun 2000 – 2005. Sunarna-Sri Hartini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2010 – 2015.

Politik kekerabatan di Kabupaten Klaten diperkuat dengan munculnya Sri Mulyani selaku istri dari Sunarna Bupati Klaten periode sebelumnya mendampingi Sri Hartini dalam Pilkada serentak tahun 2015. Sri Hartini pada Pilkada serentak tahun 2015 mencalonkan diri sebagai Bupati Klaten dengan status petahana. Dirinya di dampingi oleh Sri Mulyani dan menjadi pasangan wanita satu – satunya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten. Pada Pilkada serentak tahun 2015 duo Sri ini diusung oleh dua partai koalisi yaitu PDIP dan Partai Nasdem. Dalam pelaksanaannya tim sukses kemenangan duo sri diketuai oleh Sunarna yang tak lain adalah suami dari Sri Mulyani yang pernah berkuasa selama dua periode di kursi bupati Kabupaten Klaten serta menjabat sebagai ketua DPC PDIP Klaten. Aroma kekerabatan begitu nampak pada Pilkada serentak tahun 2015 dimana kandidat yang mencalonkan sebagai bupati mempunyai ikatan kekerabatan maupun ikatan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Ikatan tersebut menunjukkan bagaimana praktik politik kekerabatan menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam meneruskan rantai kekuasaan pada kursi jabatan tertinggi di Kabupaten Klaten.

Politik kekerabatan menjadi senjata utama untuk memenangkan pasangan Sri Hartini – Sri Mulyani. Adanya politik kekerabatan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perolehan suara pada Pilkada. Hal tersebut dikarenakan kedekatan ataupun ikatan keluarga antara Sri Mulyani dengan Sunarna secara tidak langsung menumbuhkan benih dukungan kepada Sri Mulyani yang maju sebagai calon Wakil Bupati. Ikatan keluarga suami istri menjadi alasan utama dimana masyarakat mempunyai pandangan bahwa Duo Sri dapat dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan Sunarna yang telah memimpin selama dua periode.

Politik kekerabatan di Kabupaten Klaten mempunyai pola yang unik dalam praktik demokrasi di era modern ini. Terbentuknya pola baru dimana bukan merupakan

politik bagi-bagi jabatan di struktur pemerintahan, melainkan politik meneruskan rantai kekuasaan dalam jabatan tertinggi melalui proses Pilkada. Melalui Pilkada dua pasang keluarga tersebut cenderung untuk mempertahankan anggota keluarga atau kerabat dalam jaringan kekuasaan dimana terdapat salah satu figur yang sangat berpengaruh dalam mempertahankan kekuasaannya. Sunarna menjadi figur yang sangat berpengaruh dimana dengan latarbelakang kepemimpinannya selama dua periode dalam memimpin Kabupaten Klaten dapat secara massif memperkuat dukungan masyarakat terhadap keluarga maupun kerabat dekat dari Sunarna.

Politik kekerabatan selanjutnya diidentikkan dengan gambaran suatu kerajaan politik yang diisi oleh kolega – kolega dari penguasa, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dan berputar dalam satu lingkaran keluarga agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga tersebut. Begitu pula di Kabupaten Klaten, dimana terdapat alur politik kekerabatan yang diawali oleh terpilihnya Alm. Haryanto Wibowo sebagai Bupati Kabupaten Klaten hingga Sri Mulyani menggantikan Sri Hartini di jabatan kepala daerah karena tersangkut kasus korupsi. Berkembangnya politik kekerabatan tidak lepas dari dinamika budaya politik yang ada di Indonesia. Salah satu budaya politik yang mendasari politik kekerabatan adalah budaya politik patrimonialisme, yang mana dalam kemenangan kontes Pilkada pasangan Sri Hartini – Sri Mulyani menggunakan cara yang mengadopsi dari budaya tersebut.

Patrimonialisme yang berkembang di Indonesia identik dengan politik bagi – bagi jabatan. Patrimonialisme sendiri merujuk pada kekuasaan yang berpusat pada penguasa perseorangan tertentu, penguasa membagikan sumber daya kekuasaannya kepada pihak yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kekuasaannya (Raharjo, 2012, Hlm. 147-148).

Pola tersebut yang selanjutnya muncul dan diadopsi dalam praktik politik kekerabatan di Kabupaten Klaten untuk memenangkan Pilkada. Sebelumnya praktik budaya politik tersebut sering di jumpai pada pemerintahan masa Orde Baru, dimana Santoso (1997) menilai semasa Orde Baru berkuasa dikenal istilah “ABG” yakni akronim untuk menyebutkan ABRI-Birokrat-Golkar sebagai tiga serangkai saluran patrimonialisme kekuasaan Presiden Soeharto dalam menjaga stabilitas dan soliditas pemerintahannya. Pola yang berkembang dalam praktik politik kekerabatan tak jauh berbeda dengan gambaran patrimonialisme pada saat orde baru, khususnya di Kabupaten Klaten terdapat penguasa dalam lingkaran kekerabatan yaitu Sunarna mantan Bupati Klaten yang telah menjabat selama dua periode. Sunarna dengan segala kekuasaan dan jaringan yang telah dibangunnya pada saat menjabat sebagai Bupati mempunyai agenda untuk meneruskan rantai kekuasannya melalui pencalonan Sri Mulyani untuk mendampingi Sri Hartini dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2015.

Dinamika politik Indonesia dalam era modern pun turut mengalami perkembangan, begitu pula pada budaya politik patrimonialisme yang menjadi dasar politik kekerabatan di Indonesia. Budaya politik patrimonialisme dalam negara berkembang mengalami perubahan menuju ke arah neo patrimonialisme. Setiyono (2012, hlm. 20) mengkarakteristikan neo patrimonialisme sebagai sistem kekuasaan dimana semua otoritas pemerintahan dan hak ekonomi yang berhubungan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Setiyono juga menjelaskan dalam praktik birokrasi, budaya tersebut mempraktikkan prinsip dimana fasilitas, kewenangan dari seorang penguasa diperlakukan seolah – olah sebagai bagian dari rumah tangga pribadi para penyelenggara pemerintahan. Secara prinsip politik dinasti di Indonesia mempunyai akar yang kuat pada budaya tersebut, yang tak lain menggunakan kewenangan maupun kekuasaan seorang pemimpin guna mempermudah berjalannya kepentingan pribadi dalam segi perjalanan politik dalam pemerintahan. Politik dinasti yang berkembang di Indonesia pada era sekarang digambarkan sebagai gejala neo patrimonialistik, A.G.N Ari Dwipaya ilmuwan politik UGM dalam pernyataannya

menyebutkan neo patrimonialisme di dalamnya terdapat sistem patrimonial lama dengan mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis (keturunan/kekerabatan), ketimbang merit system (prestasi) serta dikemas dengan strategi yang baru dalam era politik modern ini.¹⁴ Terdapat pola baru dalam praktik politik dinasti di Indonesia khususnya di Kabupaten Klaten dimana tidak hanya berputar dalam birokrasi pemerintahan saja melainkan bergerak dalam kontes politik seperti Pilkada.

Berdasarkan teori tersebut politik kekerabatan di Kabupaten Klaten mempunyai kaitan dengan budaya politik neo patrimonialisme, yang mana temuan pada saat wawancara menyebutkan terdapat dua cara untuk melanggengkan politik kekerabatan melalui Pilkada. Cara yang digunakan untuk melanggengkan lingkaran kekerabatan dalam Pilkada tak lepas dari bagaimana kewenangan dari seorang penguasa diperlakukan seolah – olah sebagai bagian dari rumah tangga pribadi, yang mana terdapat suatu agenda pemerintahan Kabupaten Klaten dibawah kuasa Sunarna untuk mengangkat popularitas Sri Mulyani yang akan dipersiapkan untuk bertarung pada Pilkada. Tak hanya itu terdapat strategi yang bersifat patron klien untuk memenangkan pasangan Sri Hartini – Sri Mulyani dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2015.

PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti yang berkembang di Indonesia menjadi topik bahasan yang hangat untuk diperbincangkan. Tak terlepas praktik politik kekerabatan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Pengusungan pasangan Sri Hartini dan Sri Mulyani kental akan adanya praktik politik kekerabatan, dimana pasangan tersebut memiliki hubungan perkawinan dengan penguasa – penguasa sebelumnya. Sri Hartini mempunyai ikatan perkawinan dengan Alm. Haryanto Wibowo Bupati Klaten periode 2000-2005 begitu pula dengan Sri Mulyani

¹⁴ Neopatrimonialistik, <http://jabar.tribunnews.com/2015/07/10/neopatrimonialistik>. Diakses pada Kamis, 25 April 2018 pukul 20.30

yang merupakan istri dari Sunarna Bupati Klaten yang menjabat selama dua periode pada tahun 2005-2010, 2010-2015. Ikatan keluarga menjadi strategi politik untuk memenangkan kontes politik dalam Pilkada. Dengan ikatan keluarga tersebut lingkaran politik dinasti meregenerasi kekuasaan dengan cara menempatkan kandidat yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada pasangan yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan penguasa sebelumnya mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan tersebut berupa bagaimana tingkat popularitas pasangan calon telah terdongkrak melalui pengaruh penguasa sebelumnya. Sri Hartini selaku mantan wakil Bupati pada periode sebelumnya jelas telah dikenal masyarakat secara luas, begitu pula dengan Sri Mulyani dikenal masyarakat melalui program PKK yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya yang tak terlepas dari pengaruh Sunarna selaku mantan Bupati Klaten selama 2 periode. Tingkat popularitas tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk mendorong tingkat elektabilitas dengan mengembangkan relasi dengan penguasa sebelumnya. Dinamika politik kekerabatan dalam pilkada tak lepas dari budaya politik neo patrimonialisme dimana terdapat praktik yang mengukung konsep tersebut dalam pemenangan calon. Seperti halnya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan dan hubungan patron klien dalam pemungutan suara menunjukkan bahwa politik kekerabatan erat kaitannya dengan budaya politik neo patrimonialisme.

Terpilihnya pasangan Sri Hartini – Sri Mulyani pada Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2015 menggambarkan bagaimana masyarakat Kabupaten Klaten menganggap politik kekerabatan sebagai suatu kewajaran. Disamping terdapat isu – isu yang bergulir di masyarakat baik isu negatif maupun positif mengenai politik kekerabatan, lingkaran kekerabatan tersebut tetap menunjukkan eksistensinya dalam Pilkada. Terlepas dengan beberapa pandangan mengenai politik kekerabatan, segala keputusan dalam demokrasi berada di tangan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya dalam Pilkada dan hasilnya Kabupaten Klaten dikuasai oleh dua keluarga secara bergantian selama hampir 20 tahun ini.

Saran

Partai politik sebagai perwajahan masyarakat di suatu daerah sudah seharusnya memberikan sajian demokrasi yang bersih dan bermartabat. Disamping hal tersebut tuntutan pendidikan politik harus dilaksanakan oleh partai politik dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Praktik politik kekerabatan menjadi sah dilakukan apabila kandidat terkait dapat dipercaya dari segi kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila terdapat kandidat yang terikat kekerabatan menyalahi aturan yang ada sebaiknya diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Untuk masyarakat Kabupaten Klaten tingkat partisipasi politik perlu ditingkatkan baik dalam segi pemilihan umum maupun kegiatan politik yang lainnya, terutama pada proses pendidikan politik. Tanpa adanya sikap kritis pada dinamika politik yang ada di Kabupaten Klaten akan menjadikan masyarakat antipati terhadap politik. Masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya sebaiknya mempertimbangkan dan memikirkan secara matang sebelum menjatuhkan pilihan terhadap kandidat dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, Muhammad, 2015 *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*. Yogyakarta, Buku Litera
- Agustino, Leo, 2011, *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Bandung, Widya Padjadjaran
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Pt Rineka Cipta
- Bathoro, Alim, 2011, *Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2
- Djati, Wasisto Raharjo 2013, *Revivalisme Kekuasaan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*, Jurnal Sosiologi Masyarakat

- Efriza, 2012, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Modern*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia
- Harjanto, Nico 2011, *ANALISIS CSIS: Politik Kekerabatan di Indonesia*, Jakarta, CSIS
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Imawan, Riswanda, 2004, *Partai Politik di Indonesia, Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UGM.
- Mahadi, Helmi, 2011, *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman*, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 No.1 Februari 2011
- Moleong, Lexy J. ,2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muhadi, Helmi, 2011, *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No.1
- Nimmo, Dan, 2009. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Rosda
- Nurdin, Nurliah, 2011, *Politik Dinasti Tidak Mengenal Batas Negara*, Jakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI Edisi 36
- Raharjo, Wasisto, 2012, *Kultur Birokrasi Patrimonialisme dalam Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jogjakarta, Jurnal Borneo Administrator, Volume 8, No. 2
- Saiful Mujani, R. Dkk 2012, *Kuasa Rakyat: Analisa Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Media Utama (MMU)
- Santoso, P. B, 1997. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Setiyono, Budi, 2012, *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*, Bandung: Nuansa
- Sjamsuddin, Nazzaruddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta,

Tantri, Dyah, 2017. *Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik*. Bandung: CosmoGov

Internet

<https://tokohsurakarta.wordpress.com/2009/09/09/perjalanan-bupati-sunarno/> diakses pada 30 November 2017

<http://kpu-klatenkab.go.id/biodata-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-pada-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-klaten-tahun-2015/> diakses pada 8 maret 2017

<https://pilkada2015.kpu.go.id/klatenkab> diakses pada 8 maret 201

<http://www.suarapemilih.com/kpu-tetapkan-duo-sri-jadi-pemenang.html> diakses pada 7 maret 2017

Robekka, Deytri, 2013, “60 Orang Yang Terlibat Politik Dinasti!”,

www.nasional.kompas.com/Read/2013/10/1850579/60. diakses pada 20 Maret 2017, pukul 21.15

Mada, Sukmajati, 2017, *Calon Petahana*,

<http://davidefendi.staff.umy.ac.id/2017/01/12/calon-petahana/> diakses pada 20 April 2017, pukul 18.00

Neopatrimonialistik

<http://jabar.tribunnews.com/2015/07/10/neopatrimonialistik>. Diakses pada Kamis, 25 April 2018 pukul 20.30

